

ABSTRAK

Bambang Badrudin: Penyelenggaraan Haji pada Akhir Masa Orde Baru hingga Awal Masa Reformasi di Kota Bandung Tahun 1990-2000

Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam merupakan komunitas muslim terbanyak setelah kawasan Timur Tengah. Tak mengherankan telah banyak orang Indonesia sejak dulu yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dan sampai sekarang antusias masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah suci tersebut sangatlah tinggi. Tercatat bahwa sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan baik itu pada masa orde lama, orde baru hingga reformasi, penyelenggaraan haji di Indonesia mempunyai perbedaan disetiap periodenya sesuai dengan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu.

Dalam Skripsi ini akan memaparkan mengenai Penyelenggaraan Haji pada Akhir Masa Orde Baru hingga Awal Masa Reformasi di Kota Bandung Tahun 1990-2000.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun sumber data primer adalah arsip-arsip dokumen yang dikeluarkan pada periode tahun 1990-2000 mengenai kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dan beberapa buku yang membahas tentang haji pada masa orde baru dan reformasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Penyelenggaraan Haji di Indonesia diantaranya di Kota Bandung mempunyai beberapa perubahan disetiap periodenya. Pada akhir masa periode orde baru (1990- 1998) penyelenggaraan haji diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan juga swasta. Pada waktu itu jamaah yang ingin pergi untuk berhaji dari tahun ke tahun terus meningkat akhirnya pada masa itu lahirlah istilah ONH Plus yang dikelola oleh swasta dibawah pengawasan dari pemerintah pusat, namun pada masa itu juga ketika krisis moneter melanda negara Asean termasuk Indonesia, biaya untuk pergi berhaji terus meningkat. Ditambah pada waktu itu juga terindikasi adanya praktek monopoli dalam penyelenggaraan haji. Setelah itu pada masa reformasi (1998- 2000), penyelenggaraan haji relatif lebih baik diantaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang No.17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dalam hal pelayanan, pembinaan dan keselamatan Jemaah haji Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Pada masa ini juga pemerintah untuk pertama kalinya menggunakan dan mengembangkan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Dengan adanya sistem yang lebih modern ini, calon jamaah haji lebih dimudahkan mengakses informasi dengan sistem *online* dan *real time*.

Kata Kunci: Haji, Orde Baru, Reformasi, Bandung.